

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. (2019). *Manajemen keuangan: Pengelolaan sumber dana, alokasi, dan pembagian keuntungan*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi, hlm. 265). Rineka Cipta.
- Armereo, D., et al. (2020). *Pengelolaan keuangan: Konsep dan aplikasi*.  
Irfani, M. (2020). *Manajemen keuangan perusahaan: Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana*.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 8(3), 40-53.
- Ayler, M. I. L., Ndraha, B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1(2), 34-45.
- Broad, E. (2019). *Implications of artificial intelligence on ethics and privacy in government decision-making*.
- Government Finance Officers Association (GFOA). (2020). *Pelaporan keuangan yang transparan: Kunci akuntabilitas pemerintah* (hlm. 12-18). GFOA.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan*, 9(1), 13-25.
- Irfani, M. (2020). *Manajemen keuangan perusahaan: Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana*.
- Jatmiko, B. (2017). *Ruang lingkup pengelolaan keuangan: Perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan*.
- Kotter, J. (2020). *Change management for digital government: Cultural transformation and innovation in public administration*.
- Luthfia, N. (2022). *Kendala transparansi melalui teknologi digital*. Jakarta: Penerbit Teknologi.



no. (2020). *Keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

- McKinsey & Company. (2021). *Transformasi digital dan validasi data*. Jakarta: McKinsey Indonesia.
- McKinsey & Company. (2019). *Building digital infrastructure and literacy for efficient governance*.
- Mardiasmo. (2020). *Pengawasan keuangan daerah melalui integrasi aplikasi SIPD*.
- McKinsey & Company. (2020). *Digitalisasi dalam sektor publik: Dampak pada efisiensi dan biaya administrasi*. McKinsey & Company. Hal. 1-12.
- OECD. (2018). *Penggunaan data analitik dalam pengelolaan keuangan pemerintah: Tren dan hasil*. OECD Publishing. Hal. 25-40.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Transparansi dalam pengelolaan keuangan: Praktik terbaik dan dampaknya terhadap efisiensi internal pemerintahan* (hlm. 45-60). OECD Publishing.
- Purba, R., et al. (2021). *Manajemen keuangan: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan*.
- Putra, G. (2017). Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 15-27.
- Qur'aini, K. S. (2024). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) berbasis web server. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Daerah*, 5(2), 22-38.
- Rogers, E. M. (2021). *Adopsi teknologi dalam organisasi*. New York: Free Press.
- Rahayu, D., & Pratama, A. (2020). Peran SIPD dalam integrasi data dan transparansi pemerintahan daerah.
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 50-63.
- Reza, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). Evaluasi implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten



Bulukumba. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 11(1), 33-47.

Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 4(1), 54-67.

Setiawan, B. (2022). *Aplikasi SIPD untuk transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah*.

Suryanto, T. (2021). Implementasi SIPD: Efisiensi administrasi dan tantangan teknis.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 44-56.

United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Peran transparansi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik* (hlm. 15-23). UNDP.

World Bank. (2021). *Peningkatan kredibilitas laporan keuangan publik melalui teknologi digital*. World Bank Group. Hal. 10-22.

World Bank. (2021). *Transparansi dalam pengelolaan keuangan: Dampaknya terhadap pengambilan keputusan dan manajemen risiko fiskal* (hlm. 28-32). World Bank Group.

Yahya, K. L., Amalia, I., & Nurhaini, L. (2023). Transformasi digitalisasi dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju efisiensi dan transparansi. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 7(1), 12-21.

